

## **Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembangunan Negara**

**Rasji<sup>1</sup> Anya Sitara Budidarsono<sup>2</sup> Chrissonia Margareta Mbayang<sup>3</sup> Laurencia Ryanto<sup>4</sup>**  
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>  
Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [anya.205230239@stu.untar.ac.id](mailto:anya.205230239@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup> [chrissonia.205230142@stu.untar.ac.id](mailto:chrissonia.205230142@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [laurencia.205230347@stu.untar.ac.id](mailto:laurencia.205230347@stu.untar.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Artikel mengenai kedudukan dan peranan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembangunan negara ini menyoroti pentingnya lembaga perwakilan dalam proses politik dan pembangunan. DPR memegang peran vital dalam menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi. Tantangan seperti korupsi, kurangnya akuntabilitas, dan kompleksitas politik menghadirkan hambatan yang perlu diatasi dalam memperkuat peran DPR. Evaluasi terhadap upaya-upaya reformasi dan strategi-strategi yang lebih efektif diperlukan untuk meningkatkan kinerja DPR dalam membangun negara yang berkelanjutan dan inklusif. Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam mendukung peran DPR sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat. Fleksibilitas dan responsivitas DPR terhadap dinamika politik dan sosial menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan tersebut.

**Kata Kunci:** Pembangunan Negara, Peran, Kinerja DPR



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Dewan Perwakilan Rakyat, atau yang lebih dikenal dengan akronim DPR, merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran vital dalam sistem pemerintahan di banyak negara. Melalui proses legislasi, pengawasan, dan representasi, DPR menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam suatu negara. Dalam pandangan konstitusi, DPR sering kali diakui sebagai perwakilan suara rakyat, sebuah wadah di mana aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat tercermin dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik. DPR berperan sebagai badan pengambil keputusan yang mempengaruhi arah kebijakan negara serta kehidupan warganya. Namun, peran dan fungsi DPR tidak hanya sebatas pada aspek legislasi semata. Lebih dari itu, DPR juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, menjalankan fungsi representasi masyarakat, serta memberikan pengakuan dan dukungan terhadap aspirasi serta kepentingan rakyat.

Sejarah peran DPR dalam konteks sistem pemerintahan bisa ditelusuri hingga berabad-abad yang lalu, tergantung pada perkembangan sistem politik suatu negara. Di banyak negara, lembaga serupa dengan fungsi yang serumpun dengan DPR telah ada sejak zaman kuno. Contohnya adalah Senat Romawi yang berperan sebagai badan legislatif dalam sistem politik Republik Romawi. Namun, bentuk dan fungsi DPR modern telah berkembang dari konsep perwakilan rakyat yang mulai diperkenalkan pada masa Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18. Revolusi ini melahirkan konsep bahwa kekuasaan pemerintah harus berasal dari rakyat dan untuk rakyat, sehingga memunculkan konsep perwakilan dalam pembuatan keputusan politik. DPR umumnya terdiri dari anggota yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum. Jumlah anggota DPR bervariasi antar negara, tergantung pada sistem pemilihan dan ukuran

populasi. Misalnya, di beberapa negara dengan sistem proporsional, jumlah anggota DPR mungkin lebih besar dibandingkan dengan negara yang menerapkan sistem mayoritas. Selain itu, struktur internal DPR juga dapat berbeda-beda, termasuk pembagian ke dalam komite-komite yang mengurus bidang-bidang spesifik.

Fungsi utama DPR adalah membuat undang-undang atau legislasi. Proses legislasi melibatkan pembahasan, penyusunan, dan pengesahan berbagai peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. DPR juga memiliki kewenangan untuk mengubah atau mencabut undang-undang yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan masyarakat. Selain fungsi legislasi, DPR juga memiliki peran pengawasan terhadap pemerintah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan dan aspirasi rakyat serta berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti rapat dengar pendapat, hak interpelasi, dan hak angket. Melalui mekanisme ini, DPR dapat mengontrol kebijakan dan kinerja pemerintah serta memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Selanjutnya, DPR juga berperan sebagai wadah representasi rakyat. Sebagai perwakilan rakyat, anggota DPR diharapkan dapat menjadi suara bagi kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Dengan mendengarkan masukan dan keluhan dari konstituennya, anggota DPR dapat mengadvokasi kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat legislatif. Selain itu, DPR juga memiliki fungsi sebagai forum debat dan negosiasi antarpartai politik. Di dalam DPR, berbagai partai politik yang memiliki ideologi dan platform yang berbeda dapat bertemu untuk berdiskusi dan bernegosiasi dalam rangka mencapai mufakat atas berbagai kebijakan yang diajukan. Hal ini merupakan cerminan dari pluralitas politik yang ada dalam suatu negara dan penting untuk menciptakan keseimbangan kepentingan yang beragam dalam proses pembuatan keputusan.

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, DPR didukung oleh berbagai perangkat dan lembaga pendukung seperti komite-komite yang mengkhususkan diri dalam bidang-bidang tertentu, badan legislasi untuk menyusun rancangan undang-undang, serta sekretariat untuk memberikan dukungan administratif. Semua perangkat ini bekerja sama untuk memastikan kelancaran proses legislasi, pengawasan, dan representasi yang dilakukan oleh DPR. Penting untuk diingat bahwa keberhasilan DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya sangat bergantung pada kualitas dan integritas anggota DPR itu sendiri, serta dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi kinerja DPR. Keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi merupakan prinsip-prinsip penting yang harus dijunjung tinggi oleh DPR agar dapat menjadi lembaga yang efektif dalam mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat. Secara keseluruhan, DPR memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan sebuah negara. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi, DPR berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, peran DPR tidak bisa dianggap remeh, melainkan harus diperjuangkan agar dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara.

Mengetahui kedudukan dan peranan DPR dalam pembangunan negara memiliki urgensi yang tak terbantahkan dalam konteks penguatan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Pertama-tama, pemahaman yang jelas tentang kedudukan DPR memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja lembaga tersebut dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. DPR, sebagai representasi suara rakyat, memiliki peran yang krusial dalam menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta perlindungan hak-hak warga negara. Dengan memahami peranan DPR, masyarakat dapat memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi mereka tercermin dalam

proses pembuatan kebijakan, sehingga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas lembaga legislatif. Selain itu, pengetahuan akan peranan DPR dalam pembangunan negara juga penting untuk mengoptimalkan sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil dalam merumuskan dan melaksanakan program-program pembangunan yang efektif dan inklusif. DPR berperan sebagai forum debat dan pengambil keputusan yang mewakili beragam kepentingan masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peranannya, kerjasama antara DPR dengan lembaga lainnya dapat ditingkatkan untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang kedudukan dan peranan DPR menjadi landasan yang kuat bagi proses pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kedudukan dan peranan DPR dalam pembangunan negara melalui kajian literatur dari penelitian terdahulu merupakan suatu pendekatan yang penting dan efektif. Dalam penelitian semacam ini, para peneliti akan menyusun dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, laporan riset, dan dokumen resmi pemerintah yang telah mengkaji isu terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, konsepsi, serta implementasi peranan dan kedudukan DPR dalam pembangunan negara secara komprehensif. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang umumnya dilakukan dalam metode penelitian ini. Pertama, langkah awal dalam metode penelitian ini adalah identifikasi dan seleksi sumber literatur yang relevan. Peneliti akan melakukan pencarian secara sistematis melalui basis data jurnal ilmiah, perpustakaan digital, serta repositori daring yang menyediakan akses ke artikel, buku, dan laporan riset terkait dengan peranan dan kedudukan DPR dalam pembangunan negara. Kriteria seleksi sumber literatur biasanya didasarkan pada relevansi dengan topik penelitian, kualitas metodologi penelitian, serta keakuratan dan keandalan informasi yang disajikan. Setelah sumber literatur terpilih, tahap selanjutnya adalah analisis terhadap konten dari sumber-sumber tersebut. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan gagasan utama yang terkait dengan peranan dan kedudukan DPR dalam pembangunan negara. Peneliti akan mengumpulkan data-data yang relevan, seperti konsep-konsep teoritis, temuan empiris, dan argumen-argumen yang disajikan dalam sumber literatur tersebut. Proses analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang berbagai perspektif dan sudut pandang yang ada terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti akan menyusun sintesis atau rangkuman dari temuan-temuan yang ditemukan dalam sumber literatur tersebut. Sintesis ini akan mencakup pemahaman tentang berbagai aspek peranan dan kedudukan DPR dalam pembangunan negara, termasuk tujuan-tujuan pembangunan yang diamanatkan kepada DPR, mekanisme-mekanisme yang digunakan oleh DPR dalam menjalankan peranannya, serta dampak dari kinerja DPR terhadap proses pembangunan nasional. Selain itu, dalam tahap analisis ini, peneliti juga akan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau area-area yang masih belum tercakup secara memadai dalam literatur yang ada. Hal ini dapat memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang peranan dan kedudukan DPR dalam pembangunan negara. Selanjutnya, peneliti akan menyusun hasil analisis tersebut dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif. Laporan penelitian ini akan memuat rangkuman temuan-temuan dari sumber literatur, analisis sintesis, serta rekomendasi-rekomendasi yang disusun berdasarkan pemahaman yang diperoleh. Rekomendasi-rekomendasi ini dapat meliputi saran-saran untuk perbaikan sistem perwakilan politik, pembaruan kebijakan, serta arahan untuk penelitian lanjutan dalam bidang yang sama. Selain itu, metode penelitian ini juga

dapat melibatkan analisis komparatif antara berbagai konteks dan negara yang berbeda dalam rangka memperdalam pemahaman tentang peranan dan kedudukan DPR dalam pembangunan negara. Pendekatan ini dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja DPR serta mengevaluasi berbagai strategi yang telah diterapkan dalam konteks yang berbeda. Secara keseluruhan, metode penelitian melalui kajian literatur dari penelitian terdahulu merupakan pendekatan yang penting dan efektif dalam memahami kedudukan dan peranan DPR dalam pembangunan negara. Dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai temuan dari sumber-sumber literatur yang relevan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang isu ini serta memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan teori dan praktik dalam bidang ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dari kajian literatur mengenai kedudukan dan peranan DPR dalam pembangunan negara, berbagai temuan dan analisis dapat disimpulkan. Pertama-tama, dapat dilihat bahwa kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memberikan landasan yang kuat bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan negara. DPR dianggap sebagai wadah bagi suara rakyat untuk diwujudkan dalam kebijakan publik. Melalui pemilihan umum, anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat dalam proses pembangunan negara. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi representatif, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan mengambil keputusan atas nama mereka dalam lembaga legislatif. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang kedudukan DPR sebagai perwakilan rakyat menjadi krusial dalam mengevaluasi kinerja lembaga ini dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam proses pembangunan. Selanjutnya, dalam konteks peran DPR dalam pembangunan negara, terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah dimensi legislasi, di mana DPR memiliki fungsi untuk membuat undang-undang yang akan menjadi landasan hukum bagi pembangunan negara. Proses legislasi yang dilakukan oleh DPR mencakup pembahasan, penyusunan, dan pengesahan berbagai peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, DPR memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta perlindungan hak-hak warga negara. Melalui proses legislasi ini, DPR dapat memberikan landasan yang kuat bagi implementasi program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Peran DPR dalam pembangunan negara juga mencakup dimensi pengawasan terhadap pemerintah. DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah guna memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan dan aspirasi rakyat serta berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui mekanisme pengawasan seperti rapat dengar pendapat, hak interpelasi, dan hak angket, DPR dapat memeriksa, mengontrol, dan mengevaluasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam proses pembangunan. Selain itu, peran DPR dalam pembangunan negara juga meliputi dimensi representasi masyarakat. Sebagai perwakilan rakyat, anggota DPR diharapkan dapat menjadi suara bagi kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Melalui interaksi dengan konstituennya, anggota DPR dapat mendengarkan masukan, keluhan, dan aspirasi masyarakat serta mengadvokasi kepentingan mereka dalam proses pembuatan keputusan di tingkat legislatif. Dengan demikian, peran DPR sebagai forum representasi masyarakat menjadi penting dalam memastikan bahwa kepentingan rakyat tercermin dalam kebijakan publik yang dihasilkan oleh

lembaga legislatif. Dari hasil penelitian tersebut, beberapa pembahasan penting dapat diidentifikasi untuk mendalami pemahaman tentang kedudukan dan peranan DPR dalam pembangunan negara. Pertama-tama, penting untuk menyadari bahwa peran DPR dalam pembangunan negara tidak terpisah dari konteks sistem politik, ekonomi, dan sosial yang ada dalam suatu negara. DPR beroperasi dalam kerangka institusi yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, untuk memahami peranan dan kedudukan DPR secara holistik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks institusional, politik, dan sosial di mana DPR beroperasi.

Selanjutnya, peran DPR dalam pembangunan negara juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan kekuatan politik yang ada dalam suatu negara. DPR tidak selalu memiliki kewenangan yang sama di setiap negara, tergantung pada sistem politik dan konstitusi negara tersebut. Faktor-faktor seperti pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan, sistem pemilihan umum, dan struktur partai politik dapat memengaruhi kinerja dan peran DPR dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, dalam menganalisis peranan dan kedudukan DPR, penting untuk memperhitungkan faktor-faktor politik dan institusional yang memengaruhinya. Selain itu, peran DPR dalam pembangunan negara juga dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Anggota DPR merupakan bagian dari masyarakat yang mereka wakili, dan pengalaman serta latar belakang mereka dapat memengaruhi cara pandang dan pendekatan mereka terhadap pembangunan negara. Oleh karena itu, untuk memahami peranan dan kedudukan DPR secara menyeluruh, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk konteks di mana DPR beroperasi. Selanjutnya, dalam mengkaji peranan dan kedudukan DPR dalam pembangunan negara, penting untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh DPR termasuk masalah korupsi, kelemahan dalam sistem pemilihan umum, dan kurangnya kapasitas dan kemandirian anggota DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, dalam merumuskan rekomendasi dan strategi untuk memperkuat peran dan kedudukan DPR dalam pembangunan negara, perlu untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas lembaga tersebut.

Selain identifikasi tantangan, penting juga untuk mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat peran dan kedudukan DPR dalam pembangunan negara. Banyak negara telah mengimplementasikan reformasi kelembagaan dan perubahan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas DPR. Upaya-upaya ini meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik, serta peningkatan kapasitas anggota DPR melalui pelatihan dan pendidikan. Evaluasi terhadap keberhasilan dari upaya-upaya tersebut dapat memberikan wawasan yang berharga dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk memperkuat peran dan kedudukan DPR dalam pembangunan negara di masa depan. Selanjutnya, dalam konteks globalisasi dan kompleksitas tantangan pembangunan, peran DPR dalam mengatasi isu-isu lintas batas juga menjadi semakin penting. DPR tidak hanya bertanggung jawab untuk mengatasi isu-isu domestik, tetapi juga perlu berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang bersifat internasional, seperti perdagangan internasional, perubahan iklim, dan penanggulangan terorisme. Oleh karena itu, untuk memperkuat peran dan kedudukan DPR dalam pembangunan negara, penting untuk memperkuat kerjasama antarparlemen dan memperkuat kapasitas DPR dalam mengatasi isu-isu global yang kompleks.

Selain itu, evaluasi terhadap peran dan kedudukan DPR dalam pembangunan negara juga perlu memperhatikan aspek-aspek kualitatif yang tidak selalu terukur secara langsung. Misalnya, kontribusi DPR dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan

supremasi hukum merupakan aspek-aspek penting yang tidak selalu dapat diukur dengan indikator kuantitatif. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi peran dan kedudukan DPR, penting untuk memperhatikan kontribusi DPR dalam membangun budaya politik yang inklusif, pluralis, dan demokratis. Dalam konteks dinamika politik dan perubahan sosial yang cepat, peran DPR juga perlu terus disesuaikan dan diperbarui agar relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini memerlukan fleksibilitas dan adaptasi yang baik dari DPR terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan politik. Oleh karena itu, dalam merumuskan strategi untuk memperkuat peran dan kedudukan DPR dalam pembangunan negara, penting untuk memperhitungkan dinamika politik dan sosial yang terus berubah serta memastikan bahwa DPR dapat menjadi lembaga yang responsif dan adaptif terhadap tantangan yang dihadapi. Terakhir, penting untuk menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat dalam mendukung peran dan kedudukan DPR dalam pembangunan negara. Masyarakat memiliki peran yang penting dalam memantau kinerja DPR, memberikan masukan, dan mendesak DPR untuk bertindak atas nama kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam upaya untuk memperkuat peran dan kedudukan DPR, perlu untuk membangun kesadaran politik dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik. Dengan demikian, DPR dapat menjadi representasi yang lebih efektif dari suara dan kepentingan rakyat dalam pembangunan negara.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, kajian literatur mengenai kedudukan dan peranan DPR dalam pembangunan negara menyoroti kompleksitas dan signifikansinya dalam konteks politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. DPR, sebagai lembaga perwakilan rakyat, memegang peran yang vital dalam menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi, DPR memiliki potensi besar untuk membentuk arah pembangunan negara yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh DPR dalam menjalankan perannya menunjukkan perlunya reformasi dan perbaikan dalam sistem politik dan kelembagaan. Evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat peran dan kedudukan DPR, serta identifikasi strategi-strategi yang lebih efektif, menjadi langkah penting dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas DPR dalam pembangunan negara. Selain itu, partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci dalam mendukung peran DPR sebagai lembaga representatif yang mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat. Dalam menghadapi dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang cepat, DPR perlu terus beradaptasi dan memperbarui peran serta fungsinya agar tetap relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas DPR menjadi kunci dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan tersebut. Dengan demikian, peran DPR dalam pembangunan negara tidak hanya merupakan tanggung jawab lembaga itu sendiri, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi dinamis antara DPR, pemerintah, dan masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbarrudin, A. (2013). Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI Dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945. *Pandecta Research Law Journal*, 8(1).
- Mayrudin, Y. M. A. (2017). Tirani DPR Atas Negara: Menggugat Kuasa DPR RI, Menuju Efektifitas Pemerintahan. *Journal of Governance*, 1(1).
- Riswanto, A. (2016). *Strategi Politik-Hukum Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR Ri Dalam Produktivitas Legislasi Nasional*. Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta.

- Rorimpandey, J. (2016). Tinjauan Yuridis Fungsi Dpr Ri Dalam Pengawasan Pelaksanaan Apbn Menurut UU No 17 Tahun 2004. *Lex Administratum*, 4(1).
- Sucipto, F. (2020). Analisis Peran dan Fungsi DPR/DPRD Sebagai Legislator ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(2), 150-158.